

Melawi Urutan Terakhir Pemeriksaan BPK

Pontianak, BERKAT.

Kabupaten Melawi mendapatkan nilai paling akhir dengan skor 14 peringkat 12, se-Kabupaten/Kota dalam hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI. Hal ini dikatakan oleh Kepala

BPK RI Perwakilan Kalbar, Ir. Adi Sudibyo, MM, usai menyerahkan TLHP di Kantor perwakilan BPK RI Kalbar, Senin (22/8).

"Kabupaten Melawi mendapatkan skor terendah dengan nilai 14, sementara Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan

peringkat kedua dengan skor 57 dan Kabupaten Sintang peringkat ke tujuh dengan skor 34," ungkap Adi Sudibyo.

BERKAT
BERITA KHATULISTIWA

Selasa, 23 Agustus 2011

Melawi Urutan Terakhir Pemeriksaan BPKdari Hal 1

LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) diterima. Selanjutnya BPK RI melakukan penelaahan terhadap dokumen tindak lanjut apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan rekomendasi," jelas Adi.

Sampai dengan semester satu tahun di 2011 ini, menurut Adi Sudibyo, BPK telah melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap lima belas entitas yang ada di Kalbar dan mencatat terdapat 2.404 temuan dari 4.849 rekomendasi. Temuan dan rekomendasi ini mengalami peningkatan 12 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 2.144 temuan dari 4.313 rekomendasi.

"Dari 4.849 rekomendasi yang diberikan BPK, sejumlah 2.740 atau sebesar 57 persen rekomendasi telah sesuai dengan tindak lanjut. Dan sejumlah 770 atau 16 persen rekomendasi belum ditindaklanjuti," katanya lagi.

Ia menambahkan untuk tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi terdapat peningkatan 10 persen dibandingkan posisi semester dua tahun lalu. Sedangkan untuk tindak lanjut yang telah dilakukan namun belum selesai, terjadi penurunan dari 30 persen semester dua tahun lalu menjadi 28 persen pada semester satu tahun ini.

"Sementara penurunan yang signifikan terjadi pada jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebesar tujuh persen dari 23 persen menjadi 16 persen. Dari progress ini menunjukkan bahwa Pemprov Kalbar telah menunjukkan usaha

la menerangkan, bahwa hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI (TLHP) ini merupakan amanah yang diberikan dan sesuai dengan pasal 23 E ayat (2) UUD 1945, pasal 18 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 dan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006.

"Bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan oleh pejabat BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah

LANJUTAN BACA HAL 11

yang keras untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan telah menghasilkan capaian-capaian yang cukup signifikan," paparnya. Terhadap hasil TLHP ini sendiri, Adi Sudibyo berharap kepada seluruh Kabupaten/kota untuk tetap menjaga konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

"Selain juga untuk lebih meningkatkan percepatan tindak lanjut perbaikan tata kelola keuangan dengan lebih baik lagi," pungkasnya. Sementara itu untuk capaian hasil peringkat TLHP adalah, Kabupaten Kubu Raya berhasil ditetapkan sebagai peringkat pertama dengan skor 59, peringkat kedua dengan skor 57 diperoleh Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sambas. Diurutan peringkat Ketiga dengan skor 44 diraih Kabupaten Landak, peringkat 4 diraih oleh Kabupaten Bengkayang dengan skor 43. Kabupaten Sekadau meraih peringkat kelima dengan skor 42.

Dilanjutkan dengan peringkat ke enam dengan skor 37 diraih oleh Kabupaten Kayong Utara, peringkat ke tujuh dengan skor 34, diraih oleh Kabupaten Sintang dan Kota Singkawang. Peringkat delapan Kabupaten Pontianak dengan skor 33, peringkat Sembilan Kota Pontianak dengan skor 29. Peringkat sepuluh diraih oleh Kabupaten Sanggau dengan skor 27, sementara peringkat sebelas diraih oleh Kabupaten Ketapang dengan skor 22. Dan peringkat terakhir, atau peringkat 12 diraih oleh Kabupaten Melawi dengan skor 1. (aca)